

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Kurnia<sup>2</sup>, D. (1945). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Jurnal Academia Praja*, 5(1), 56–72.
- Alexander Wewo, J. (2018). Code of Ethics Urgency in the Implementation of General Election in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 194. doi:10.20884/1.jdh.2018.18.2.1744
- Amir, M. (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115–131. doi:10.33096/aijih.v23i2.41
- Andreoni, A. (2022). Review essay: Compressed Development and the Political Economy of Developmentalism. *Theory and Research in Education*, 9(2), 185–196. doi:10.1177/1477878511409797
- Arifuddin. (2017). sistem informasi partai politik dalam perspektif Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. *Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 5(1), 43. doi:10.1017/CBO9781107415324.004
- Arofah, F. A. F. (2016). Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). *Jurnal Transformative*, 2(1), 29–42.
- Asadi, N., & Asl, S. R. (2022). A Conceptual Framework for Understanding Democracy Dimensions in Public Spaces: The Case of 30Tir Street in Tehran. *Journal of Regional and City Planning*, 33(1), 24–47. doi:10.5614/jpwk.2022.33.1.2
- Bagus, L. (2015). Bagus, Lorens, Kamus Filsafat , Cet. II, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal 161. 42, 42–79.
- Dendy, L. (2016). POLITIKA, Vol. 7, No.1, April 2016. *Politika*, 7(1), 138–159.
- dkpp. (2017). Dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia.
- dkpp. Dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia (2019).
- dkpp. (2021a). *LAPORAN KINERJA: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2021*. jakarta.
- dkpp. (2021b, February). JUMAT 19 FEBRUARI 2021, DKPP AKAN PERIKSA KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BINTAN.
- Dkpp. (2019, July 12). DKPP AKAN GELAR SIDANG TIGA PERKARA DI KOTA BATAM.
- Dkpp. (2020). DKPP Ungkap Terima Banyak Aduan Pelanggaran Pasca-Pilkada 2020.
- Erwinsyahbana, T. (2018). Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (November), 6–8. doi:10.31227/osf.io/gu59k
- Fajar Lagabuana, B., Sukri, S., & Haryanto, H. (2021). Bertahan dan Menang: Strategi dan Modal Politik Sri Rahmi dalam Pemilihan Legislatif 2004-2019 di Sulawesi Selatan. *Jurnal Transformative*, 7(2), 157–173. doi:10.21776/ub.transformative.2021.007.02.1
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1. doi:10.30996/dih.v13i25.1545

- Fitriyah, F., Alfirdaus, L. K., & Manar, D. G. (2021). Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 1–10. doi:10.14710/politika.12.1.2021.1-10
- Hasan, I. R. (2016). PENGARUH SISTEM MULTI PARTAI TERHADAP KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL MENURUT UUD NRI TAHUN 1945, 105(3), 129–133.
- Hazmi, R. M. (2021). Konstruksi Keadilan , Kepastian , Dan Kemanfaatan Hukum. *Res Judicata*, 4(1), 23–45.
- Hendri, W. (2014). Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor: 23-25/DKPP-PKE-I/2012. *Jurnal Selat*, 2(1), 188–200.
- Hudori. (2017). EKSISTENSI MANUSIA (Analisis Kritis Eksistensialisme Barat dan Islam) SKRIPSI. *Solid State Ionics*, 2(1), 1–10.
- Ilman, G. M., & Fitri, R. A. (2021). Agenda Setting Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dengan Menggunakan Multiple Streams Framework. *Jurnal Transformative*, 7(1), 81–111. doi:10.21776/ub.transformative.2021.007.01.4
- Indra Permana, T. C. (2014). EKSISTENSI DAN PERAN KOMISI YUDISIAL : PENGAJIAN KONTEKS FILOSOFI, SEJARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKANNYA DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA, 105(3), 129–133.
- Irena Maki, K., A. Rumokoy, D., & A. Gerungan, C. (2020). KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMUTUS PELANGGARAN KODE ETIK. *Lex Administratum*, 42(1), 511–516.
- Kartika Sari, E. (2021). Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2, No.3, September 2021 428. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(3), 428–446.
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 65–76. doi:10.21009/jimd.v21i2.26013
- Kusumastuti. (2017). The old phase of javanese villages as an early form of participatory democratic governance in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 28(3), 219–236. doi:10.5614/jrcp.2017.28.3.5
- Lukmansyah, L. (2021). TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU (Studi Analisis Terhadap Putusan Penyelenggara DKPP RI No. 16 ..., (16).
- Marjian, kacang. (2010). *SISTEM POLITIK INDONESIA: KONSOLIDASI DEMOKRASI PASCA-ORDE BARU* (edisi pert). jakarta: kencana.
- Miaz, Y. (2012). *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi. Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi.*
- Midana, S. R. (2017). Kedudukan dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Sebagai Peradilan Etik dalam Penyelenggaraan Pemilu.
- Moho, H. (2019). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK

- KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN. *Warta Edisi* 60, (April), 91–96.
- Mukidi. (2015). Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Hukum KAIDAH*, 18(1), 396.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). PENGARUH *MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA. *NOTARIUS*, 2017(1), 1–9.
- Novita, R. A. (2017). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (TANAH KERING) DI DESA BRINGIN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO, 6, 1–12.
- Nurdin, M. (2013). Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079.
- Octarina, N. F., & Djanggih, H. (2019). Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 271. doi:10.20884/1.jdh.2019.19.1.2115
- Prasetyo, P. D. T. (2021). *DKPP Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat: Seri Filsafat Pemilu*. nursamedia.
- Putra, P. S. P. (2016). KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pamungkas, 105(3), 129–133.
- Rahmatullah, I. (2016). Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, (April), 5–24.
- Sarbaini. (2015). Demokratisasi, Kebebasan Memilih, Pemilihan Umum. *Jurn Sarbaini, 'Demokratisasi, Kebebasan Memilih, Pemilihan Umum.'*, *Jurnal Inovatif, VIII.1 (2015)*, 105 *al Inovatif, VIII(1)*, 105.
- Sekartadi, L. K. (2015). KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU ( DKPP ) MENGUBAH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) PROVINSI JAWA TIMUR ( STUDY KASUS PUTUSAN THE COMPETENCE OF HONORARY BOARD OF THE GENERAL ELECTIONS TO AMEND THE DECISION OF THE GENERAL ELECTION CO, (74), 399–416.
- SIMATUPANG, A. S. (2021). Kedudukan dan peranan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.
- Sinapoy, M. S., & Sanib, S. S. (2019). Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Halu Oleo Law Review*, 3(2), 283. doi:10.33561/holrev.v3i2.8758
- Sintaresmi, P., Muchsin, S., & Ahmadi, R. (2022). IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus Pencegahan Konflik Sosial Di Kota

- Probolinggo). *Jurnal Academia Praja*, 5(1), 56–72.
- Sjafirah, N. A., & Prasanti, D. (2016). Penggunaan Media Komunikasi dalam Eksistensi Budaya Lokal bagi Komunitas Tanah Aksara. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, Volume* 6(2), 39–50.
- Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Risalah Hukum*, 7(1), 39–53.
- Syaefudin, M. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. *Jurnal Usm Law Review*, 2(1), 104. doi:10.26623/julr.v2i1.2261
- Taufik, M. (2021). Politik Lokal: Potret Penyelenggara Pemilu Dalam Putusan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Di Kalimantan Timur .... *Jurnal Paradigma (JP)*, 9(2), 109–118.
- Ukas, Persada, R., & Arman, Z. (2020). Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 141–150. doi:10.33059/jhsk.v15i1.2104
- Veronica, A., & Nawawi, K. (2020). PAMPAS : Journal Of Criminal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, 1, 45–57.
- Wahyono, B. (2016). PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (DKPP) DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014, 1–116.
- Wisata, E., Pandemi, M., & Pemulihan, C.-. (2022). The Existence of Culinary Tourism During the Covid-19 Pandemic in Economic Recovery and Tourism in Sangeh Village , Badung , Bali, 6(1), 48–60. doi:10.36526/js.v3i2.1882
- Yansen, A. (2018). PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA ( Study Kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu Pada Kpud Tapanuli Tengah ).
- Zuhdi Arman. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 23–40.

Undang-undang 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Pedoman Beracara Penyelenggara Pemilu